

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah ingin mencapai suatu masyarakat yang adil makmur yang merata materiil dan spiritual. Dalam upaya merealisasikan tujuan nasional tersebut, program pembangunan disusun atas dasar trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pada awal pembangunan lima tahun (Repelita) dimulai, titik berat pembangunan diletakkan pada upaya-upaya pemulihan dan stabilitas keamanan. Dalam perjalanan waktu, titik berat pembangunan diberikan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu dalam beberapa repelita terakhir upaya-upaya pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan menjadi titik berat dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Kondisi seperti itu dicerminkan dalam program-program “Delapan Jalur Pemerataan” yang meliputi :

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khusus pangan, sandang dan perumahan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.

6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Sebagai upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyetarakan laju pertumbuhan daerah, antar kota, antar desa, antar sektor, serta pembukaan dan percepatan kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, daerah minus, daerah kitis, daerah perbatasan, dan daerah terbelakang lain yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah bersangkutan, sehingga terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan Wawasan Nusantara

Seiring dengan jalannya proses reformasi di Indonesia, ancaman disintegrasi bangsa Indonesia semakin tampak didepan mata. Ancaman disintegrasi tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia secara keseluruhan tidak bisa selalu bisa berjalan secara adil dan merata. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat, tetapi ada juga beberapa daerah yang pertumbuhannya relatif lambat. Pertumbuhan ekonomi antar daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : akumulasi modal, sumber daya manusia, peralatan fiskal, pertumbuhan pendidikan dan kemajuan teknologi. Selain itu ada ketimpangan redistribusi pembangunan dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga merupakan salah satu penyebab ketidakmerataan pembangunan di Indonesia.

Negara Indonesia terdiri atas beberapa propinsi dan Kabupaten yang menjalankan perekonomian dengan cara yang berbeda-beda. Propinsi Jawa Tengah mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian di Indonesia. Propinsi Jawa Tengah sendiri terdiri atas beberapa kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Magelang, dimana Kabupaten Magelang adalah daerah yang strategis karena merupakan lokasi berdirinya candi borobudur yang merupakan salah satu keajaiban dunia.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, kinerja ekonomi Jawa Tengah telah mengalami peningkatan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Kondisi ditingkat nasional maupun Jawa Tengah sudah barang tentu berdampak pada pola perekonomian regional termasuk diantaranya perekonomian di Kabupaten Magelang. Sejak tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang mulai menunjukkan gejala membaik, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,50% di tahun 2000, 3,91% di tahun 2001, dan 4,50 di tahun 2002.

Adapun alasan penulis memilih kabupaten Magelang adalah karena pertimbangan Kabupaten Magelang secara administratif terdiri dari 21 kecamatan dan 372 desa. Berdasarkan hasil evaluasi penggunaan tanah (EPT) tahun 1983 kabupaten Magelang mempunyai luas 1.085,73 km². Sehingga, apabila ada perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan

regional antar daerah semakin besar. Adanya pendugaan bahwa PDRB dan pelaksanaan pembangunan yang tidak merata pada tiap-tiap kecamatan, sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki masing-masing kecamatan sehingga akan menimbulkan ketimpangan.

Dengan latar belakang diatas maka penulis akan mengangkat judul :

“Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Magelang”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pola dan struktur perekonomian kecamatan di Kabupaten Magelang berdasarkan Klassen Typologi?
2. Bagaimana tingkat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Magelang?
3. Apakah ada korelasi antar pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan ekonomi di Kabupaten Magelang?

1.3 Batasan Masalah

Penulisan ini hanya dibatasi pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Magelang. Untuk mengidentifikasi tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan digunakan variabel PDRB perkapita kecamatan, PDRB perkapita Kabupaten Magelang, jumlah penduduk kecamatan, jumlah penduduk Kabupaten Magelang dengan kurun waktu 5 tahun yaitu 1999-2003.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pola dan struktur perekonomian Kecamatan di Kabupaten Magelang berdasarkan Klassen Typologi.
2. Untuk menganalisis besarnya tingkat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Magelang.
3. Untuk membuktikan apakah ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan ekonomi di Kabupaten Magelang.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan.
2. Memberikan informasi bagi pihak-pihak yang tertarik berkenaan dengan masalah ini.
3. Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.